

Indonesia di Era perang Dingin, Antara Idealisme dan Realisme Politik

Tekanan internasional untuk bergabung ke salah satu dari dua poros kekuatan dunia di masa Perang Dingin, tidak memengaruhi sikap Indonesia untuk tetap menjalankan politik bebas aktif. Namun realitas politik berkata lain, Indonesia harus mengambil sikap tatkala konflik internal dan eksternal mewarnai jalannya pemerintahan di era tersebut.

Perang Dingin di Antara Dua Kekuatan Raksasa Dunia

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, dua poros kekuatan dunia, yaitu poros barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan poros timur oleh Uni Sovyet, berupaya menguatkan kedudukan dan memperluas hegemoninya di seluruh dataran Eropa.

Masing-masing pihak merasa berjasa dan berkeyakinan bahwa ideologinya mampu membawa perubahan di dunia, khususnya di negara-negara yang mengalami krisis pasca perang.

Sikap ini menumbuhkan ketegangan di antara kedua blok tersebut, yang walaupun tidak sampai memicu pertempuran fisik, namun melahirkan Perang Dingin yang direpresentasikan dalam bentuk ketidakpercayaan, kecurigaan, spionase, propaganda, hingga kompetisi non politis.

Politik “mencari teman” pun dilancarkan dengan menawarkan berbagai bantuan dan kerjasama dalam hal politik, ekonomi, hingga kekuatan militer ke berbagai belahan dunia, termasuk ke negara-negara di luar Eropa seperti Asia dan Afrika.

Indonesia pun terpengaruh oleh arus politik dunia saat itu, serta ikut dijadikan ajang tarik menarik oleh dua kekuatan tersebut. Berbagai kebijakan-kebijakan luar negeri selama perang dingin, ikut menentukan arah pemerintahan Indonesia, khususnya di masa orde lama dan orde baru.

Kedudukan Indonesia di Peta Perpolitikan Dunia pada Masa Perang Dingin

Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia memiliki pengaruh yang kuat dalam percaturan politik internasional. Indonesia menegaskan sikapnya untuk tidak memihak blok mana pun, dan memilih politik bebas aktif.

Ketegasan ini diikuti dengan keberanian Indonesia menghimpun para pemimpin dunia ketiga untuk tidak mendukung blok-blok yang ada. Gerakan ini direalisasikan dengan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diikuti oleh negara-negara di Asia dan Afrika yang baru saja merdeka setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Bisa dikatakan bahwa Gerakan Non Blok (GNB) merupakan representasi kemandirian negara-negara dunia ketiga di masa Perang Dingin.

Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Perang Dingin

Sekalipun Idealisme membara di dalam dada, namun Indonesia tidak bisa memungkiri realitas yang terjadi di tanah air.

Dalam penjajahan yang terjadi di Irian Barat yang dilakukan Belanda, Indonesia mulai menunjukkan sikap oportunistisnya dengan menerima bantuan peralatan militer dari Amerika Serikat dan Uni Sovyet.

Keberpihakan terhadap poros timur mulai terlihat ketika Soekarno menggandeng nama besar Uni Sovyet untuk berdiplomasi dan mengintimidasi Amerika Serikat sebagai sekutu Belanda agar menarik pasukannya dari Irian Barat. Belanda akhirnya hengkang tanpa melakukan agresi sama sekali.

Ketidaksukaan terhadap imperialisme barat juga muncul akibat pengaruh neokolonialisme Inggris di Malaysia yang berimbas pada keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB.

Puncak kedekatan Indonesia dengan poros timur adalah dengan didirikannya poros Jakarta-Hanoi-Pyong Yang-Pnom Penh, yang membuat Indonesia termasuk ke dalam negara Blok Timur.

Sikap Politik di Era Demokrasi Terpimpin

Kebijakan luar negeri untuk mendekat pada poros sosialis-komunis merupakan bentuk politik konfrontasi yang dilandasi oleh pandangan *New Emerging Forces* (NEFO), yaitu kekuatan baru negara-negara progresif revolusioner yang anti imperialisme dan kolonialisme.

Sayangnya, keputusan tersebut justru mempersempit ruang gerak Indonesia di kancah Internasional. Kebijakan politik luar negeri di era demokrasi terpimpin ini pun mulai banyak mengalami penyimpangan yang berdampak pada kondisi perekonomian dalam negeri.

Pemerintah tidak mampu menahan diri untuk menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti GANEFO (*Games of the New Emerging Forces*) sejenis *Seagames* dan CONEFO (*Conference of the New Emerging Forces*) yang memakan dana super besar.

Pembangunan pun mengalami kegagalan. Nilai mata uang mengalami penurunan tajam yang berimbas pada merosotnya penghasilan negara dalam bentuk devisa. Inflasi besar-besaran terjadi dan masyarakat semakin terjepit.

Arah politik yang berkiblat ke timur, menyuburkan kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kondisi ini semakin tidak terkontrol dan berujung pada terjadinya pemberontakan berdarah yang dikenal dengan G30S/PKI.

Sikap Politik di Era Demokrasi Liberal

Peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 menjadi titik balik arah politik Indonesia. Tampuk kekuasaan Soekarno bergeser ke pemerintahan Soeharto melalui Surat perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).

Paham komunis dinyatakan sebagai hal yang terlarang dan segala akses yang berkaitan dengan ideologi tersebut, termasuk hubungan dengan negara-negara penganut paham komunis pun dihentikan.

Pemerintahan orde baru memiliki kebijakan luar negeri yang baru pula. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mulai membangun hubungan dengan negara-negara barat dengan tujuan mendapatkan dukungan dan bantuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang berada di ujung kebangkrutan.

Walaupun secara politik Indonesia menyatakan netral dan tidak berpihak pada blok mana pun, namun dari kebijakan-kebijakan yang diambil menunjukkan kecenderungan pro-barat. Seperti diterimanya bantuan keuangan dari konsorsium negara-negara barat IGGI (*Inter Government Group on Indonesia*), IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*), *World Bank*, hingga IMF (*International Monetary Fund*).

Secara bertahap Indonesia juga memperbaiki hubungan politik luar negerinya dengan mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia pun bergabung kembali menjadi anggota PBB, mendirikan ASEAN, dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara poros timur seperti Cina dan Rusia yang sempat dibekukan di awal-awal pemerintahan.

Dengan berakhirnya Perang Dingin di kawasan Eropa, Kondisi perpolitikan dan perekonomian di Asia, termasuk di Indonesia pun mengalami banyak perbaikan.